

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099994/2017**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM |
| 3. Provinsi | : (24) | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 4. Kode/Nama Satker | : (099994) | PENGADILAN NEGERI MAUMERE |
| Sebesar | : Rp. | 88.620.000 (DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	Jumlah Uang
	Rp. 88.620.000
	Rp. 88.620.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 88.620.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1. KPPN E N D E | (040) Rp. | 88.620.000 |
|-----------------|-----------|------------|

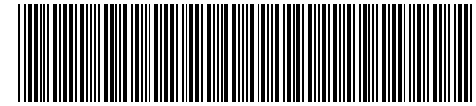
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099994/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4509-4156-9955-8410

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099994) PENGADILAN NEGERI MAUMERE

Kuasa Pengguna Anggaran : VINSENSIUS BARU
Bendahara Pengeluaran : SUSANA E. HETHARIE
Pejabat Penanda Tangan SPM : YANUATI M. K. DJAWA, SE

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		88.620.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		88.620.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		88.620.000
Hasil (Outcome)	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
IKU Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel		
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum		
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum		
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi		
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		88.620.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum		
	002	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum		
	003	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		
	004	Jumlah Penyelesaian Perkara PHI (di bawah 150 jt) di Lingkungan Peradilan Umum		
	005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
	006	Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP		
	007	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu		
	008	Penyelesaian Perkara Perikanan		
	009	Pelaksanaan SPPT/SPPA/MEDIASI/SCC		
Keluaran (Output)	1049.003	Pos Bantuan Hukum	312,00 Jam Layanan	31.200.000
	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100,00 Perkara	55.800.000
	1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	2,00 Perkara	1.620.000

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099994/2017
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4509-4156-9955-8410

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099994) PENGADILAN NEGERI MAUMERE
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099994	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	-	88.620	-	-	-	88.620		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	88.620	-	-	-	88.620		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	88.620	-	-	-	88.620		
1049.003	Pos Bantuan Hukum	-	31.200	-	-	-	31.200	24 . 06	
01	RM	-	31.200	-	-	-	31.200	040	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-	55.800	-	-	-	55.800	24 . 06	
01	RM	-	55.800	-	-	-	55.800	040	
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	-	1.620	-	-	-	1.620	24 . 06	
01	RM	-	1.620	-	-	-	1.620	040	
JUMLAH		-	88.620	-	-	-	88.620		

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099994/2017
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4509-4156-9955-8410

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099994) PENGADILAN NEGERI MAUMERE

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099994	PENGADILAN NEGERI MAUMERE													
		RENCANA PENARIKAN DANA	875	1.940	3.405	5.211	5.478	6.086	10.566	10.280	11.146	11.374	12.734	9.525	88.620
		52 BELANJA BARANG	875	1.940	3.405	5.211	5.478	6.086	10.566	10.280	11.146	11.374	12.734	9.525	88.620
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	875	1.940	3.405	5.211	5.478	6.086	10.566	10.280	11.146	11.374	12.734	9.525	88.620
		52 BELANJA BARANG	875	1.940	3.405	5.211	5.478	6.086	10.566	10.280	11.146	11.374	12.734	9.525	88.620
		PERKIRAAN PENERIMAAN	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2.196
		- PNBP (423411)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		- PNBP (423412)	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1.060
		- PNBP (423413)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
		- PNBP (423415)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	380	
		- PNBP (423419)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099994/2017
IV. C A T A T A N**



DS:4509-4156-9955-8410

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [099994] PENGADILAN NEGERI MAUMERE

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004